

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Teori ini muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. Teori keagenan ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer. Pemilik perusahaan menginginkan agar laba seolah tampak tidak besar untuk menghindari pajak yang terlalu besar. Sedangkan manajer perusahaan menginginkan agar laba terlihat besar sehingga kinerja manajer sendiri terlihat baik. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris.

Menurut Widyaningdyah (2001:91) *Agency Teori* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dengan agent. Pihak principal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dalam agency teori ini terjadi ketidakseimbangan informasi atau dengan kata lain asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi bahwa pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor. Salah satu penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan adalah terjadinya asimetri informasi dalam teori keagenan. Perilaku manipulasi yang paling sering terjadi dalam teori keagenan adalah pencatatan laba yang tinggi. Latar belakang yang menyebabkan perilaku ini adalah adanya insentif manajemen berupa bonus yang diukur dari kerja manajemen dalam mencapai laba, serta menjadi perhatian penting bagi calon investor dalam melakukan pertimbangan pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan manajer bertindak untuk memilih metoda akuntansi

yang mampu memanipulasi laporan keuangan. Dengan menerapkan perilaku konservatisme dapat mencegah manajer dalam melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan (Andreas, *dkk.* 2017).

2.2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi (Watts, 2003). Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metoda akuntansi yang melaporkan laba atau aset yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi (Andreas, *dkk.* 2017). Hati (2011) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis laba konservatif, yaitu : (1) *ex-ante conservatism* atau *news-independent conservatism* (2) *ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism*. *ex-ante conservatism* atau *news-independent conservatism* berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi laba secara independent dari kejadian-kejadian ekonomi saat ini, bahkan apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut berkaitan secara positif dengan harapan aliran kas di masa yang akan datang. *ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism* menggambarkan lebih tepat waktu untuk pengakuan laba terhadap *bad news* dari pada *good news*. Secara umum, prinsip akuntansi ini menghendaki penghapusan dengan segera untuk mengakui *bad news* terhadap persediaan, *goodwill*, ketidakpastian kerugian dan sebaliknya.

Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memiliki alternatif yang tidak akan membuat aset dan pendapatan terlalu besar (Baridwan 2002, dalam Hati 2011).

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*Prudent Reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Savitri (2016:23) menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*Understatement*).

Prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, Anda harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, Anda tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan keuangan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang lebih rendah demi untuk berjaga-jaga (Savitri, 2016:24)

A. Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti

kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.

3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.

4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkat manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

Dengan adanya pemilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut. Penerapan konsep ini juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang (Sari dan Adhariani, 2009)

B. Konservatisme Akuntansi dalam IFRS

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi Internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS berfokus pada pencatatan yang relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan IASB tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas

penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan IFRS.

Khairina (2009) menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS (*International Accounting Standard*) antara lain :

1. IAS 11 (*Zero Profit Recognition for Fixed-Price Contracts*), versi terbaru dari IAS mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Complete Contract*). Hellman (2007) menyatakan bahwa metode CC dinilai lebih konservatif dibandingkan metode POC karena dalam metode CC nilai keuntungan yang dapat diakui perusahaan akan mengalami *understatement* selama proses kontrak dan akan mengalami *overstatement* setelah kontrak selesai. Hal ini disebabkan perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan dari kontrak konstruksi tersebut setelah proses konstruksi selesai. Sementara dalam metode POC perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan estimasi persentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca.
2. IAS 12 (*Deferred Tax Asset*), mengatur mengenai pengakuan *deferred tax asset* pada neraca jika mungkin terdapat *future taxabel profit*. Sebelum dikeluarkannya IAS 12 tersebut, *deferred tax asset* tidak diakui dalam neraca karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan *taxabel profit* dimasa yang akan datang.
3. IAS 16 (*Property, Plant, and Equipment*), mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi. Metode biaya menggunakan metode yang telah lama digunakan dalam akuntansi konvensional, sementara metode revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk memperbarui aktiva secara periodik atas nilai pasarnya dinyatakan sebagai metode kurang konservatif. Dalam metode akuntansi ini, perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai aktiva sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya.

4. IAS 38 (*Capitalism of Development Cost*), pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku sejak tanggal 31 maret 2004. Berdasarkan IAS 38, aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum diberlakukannya standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang konservatif.

2.3. Teori Akuntansi Positif

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) menganut paham maksimisasi kemakmuran (*wealth-maximisation*) dan kepentingan pribadi individu. Jadi teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan sifat manajer yang memiliki dorongan untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Teori ini juga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja buruk manajer yang dapat ditutupi oleh kenaikan laba yang diperoleh perusahaan.

Teori akuntansi positif menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham)
2. Antara manajemen dan kreditor
3. Antara manajemen dan pemerintah

Prediksi teori akuntansi positif Watts dan Zimmerman (1986:200-221) dalam Mardiyah (2014) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Watts dan Zimmerman membuat tiga hipotesis yaitu hipotesis mengenai program bonus, rasio utang terhadap ekuitas dan ukuran perusahaan.

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer dan *payoff* asimetrik (Watts, 2003). Pemegang saham

dan kreditur berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2003). Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditur dan pemegang saham cenderung meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer sebagai agen dapat dianggap akan melanggar kontrak. Kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah diakibatkan oleh kualitas manajer yang buruk. Keadaan tersebut dapat memicu pemegang saham melakukan penggantian manajer, yang kemudian dapat menurunkan nilai pasar manajemen di pasar tenaga kerja. Ancaman tersebut dapat mendorong manajer menurunkan tingkat konservatisme akuntansi.

Pada perusahaan yang tidak mempunyai masalah keuangan, manajer tidak menghadapi tekanan pelanggaran kontrak sehingga manajer menerapkan akuntansi konservatif untuk menghindari kemungkinan konflik dengan kreditur dan pemegang saham. Oleh karena itu, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat konservatisme akuntansi dan sebaliknya.

2.3.1. Bonus Plan

Bonus plan hypothesis merupakan salah satu motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak terlepas dari *positif accounting theory*. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Jika perusahaan memiliki kompensasi (*bonus scheme*), maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima (Palestin, 2006 dalam Prasetyo, 2011). Penentuan ada tidaknya pemberian Bonus Plans yang diterima oleh manajemen dapat diperoleh dari informasi yang berasal dari laporan keuangan perusahaan.

2.3.2. Political Cost

Bagi perusahaan, intensitas politik sering berkaitan dengan ukuran perusahaan (Watts and Zimmeman, 1986 dalam Iskandar, 2016). Perspektif tersebut mengembangkan pemahaman, mentransfer kekayaan atau dana dari sebuah perusahaan dikarenakan terpapar keadaan politiknya, jumlah yang ditransfer sering kali berkaitan dengan ukuran dan yang tampak pada perusahaan (Godfrey, 2010 dalam Iskandar, 2016).

Political Cost mengungkapkan bahwa perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan.

Biaya politis muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Watts dan Zimmerman (1986:147) dalam Mardiyah (2014) menyatakan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan laba untuk menghindari biaya politik yang besar.

2.3.3. Debt Covenant

Debt Covenant adalah kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana yang disertai perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dalam pengembalian pinjaman tersebut (Iskandar, 2016). Menurut Scott (2003), kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditor) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan kemananan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada.

Menurut debt covenant hypothesis, perusahaan yang mempunyai nilai debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan debt to equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Pambudi, 2017)

Fatmariyani (2013) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan timbulnya suatu biaya serta dapat menghambat kerja manajemen, sehingga manajemen berusaha untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir manajemen dalam melakukan income increasing. Lebih lanjut, Fatmariyani (2013) juga mengatakan dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian utang yang telah jatuh tempo mengatakan bahwa manajer akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebiakan akuntansi yang menguntungkan dirinya, seperti mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan, karena hal tersebut dapat mengurangi resiko “default”. Hal ini bertentangan dengan konsep konservatif ditunjukkan dengan tindakan pengakuan pendapatan lebih awal (mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan) yang seharusnya tidak cepat mengakui pendapatan melainkan segera mengakui adanya beban.

Sesuai dengan penelitian Qiang (2003) dalam Pambudi (2017) yang menyatakan bahwa leverage merupakan proksi kecendrungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kontrak. Kemudian leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor maka kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk melindungi dirinya dari tindakan yang mungkin kurang menguntungkan kreditor, mereka dapat melakukan berbagai cara seperti (weston dan Brigham, 1998 dalam Pambudi , 2017) :

1. Melalui persyaratan yang diajukan dalam perjanjian kredit. Kreditor dapat mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan yang konservatif.

2. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka akan menghentikan pemberian kredit selanjutnya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi daripada yang normal.

2.4. Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.4.1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Ernawati dan Puspitasari, 2010).

Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

Komisaris independen memiliki tanggungjawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui pemberdayaan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya melaksanakan tanggungjawab dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik.

4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Didalam melaksanakan perannya komisaris independen memiliki tugas dan wewenang yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Tugas Komisaris Independen
 1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
 2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
 3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
 4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
 5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.
- b. Wewenang Komisaris Independen
 1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
 2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.4.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris

dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri.

Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah yang ada dalam manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Dan masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah satu anggota diangkat sebagai satu komisaris utama. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersama waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : (a) anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau (b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Mulyadi (Nadah Nahdiah, 2009) dalam Riniati (2015) “Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Dengan demikian, Dewan Komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

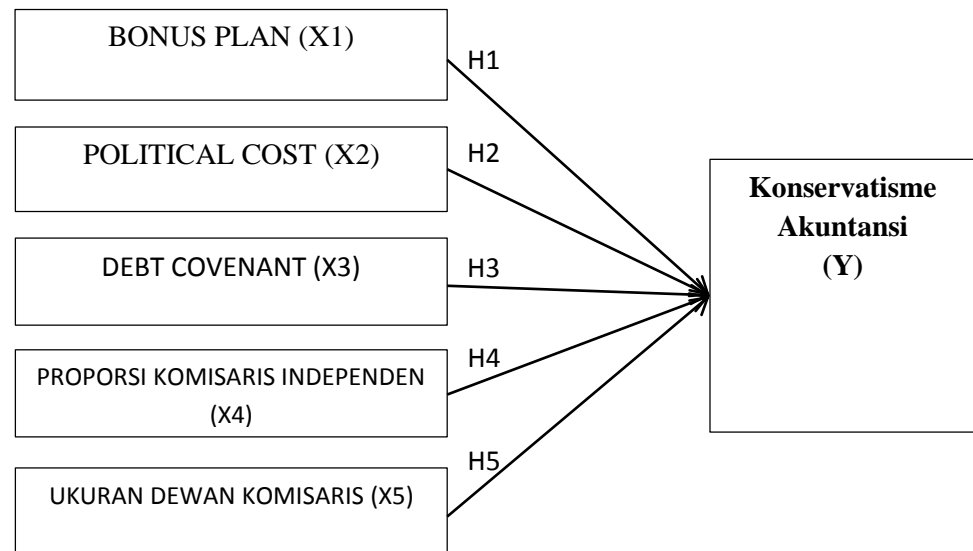
No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wardhani (2008)	Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .	1. keberadaan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. 2. independensi komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi tidak dapat dibuktikan.
2	Sari dan Adhariani (2009)	Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya.	1. <i>Debt covenant</i> yang diproksikan dengan Rasio <i>Leverage</i> tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. <i>Size</i> , risiko perusahaan, intensitas modal dan rasio konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
3	Hati (2011)	Telaah Literatur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi	Terjadi peningkatan penerapan akuntansi konservatif di beberapa dekade yang menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntansi konservatif menuai banyak kritik

			namun sampai saat ini masih tetap digunakan dan cenderung meningka
4	Yustina (2013)	Pengaruh Konvergensi IFRS dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi	1. Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. konvergensi IFRS, proporsi komisaris independen dan kepemilikan manejerial, tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
5	Vemiliyarni (2014)	Pengaruh Konvergensi IFRS, <i>Bonus Plan</i> , <i>Debt Covenant</i> dan <i>Political Cost</i> Terhadap Konservatisme Akuntansi	1. Konvergensi IFRS, <i>Bonus Plan</i> dan <i>Political Cost</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 2. <i>Bonus Plan</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
6	Mardiyah (2014)	Pengaruh Growth Opportunities, Tingkat Kesulitan Keuangan, dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi	Growth Opportunities, Tingkat Kesulitan Keuangan, dan Risiko Litigasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi
7	Iskandar (2016)	Pengaruh Debt Covenant, Bonus Plan dan Political	1. Debt Covenant berpengaruh negatif

		Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi	terhadap konservatisme akuntansi 2. Bonus Plan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi 3. Political Cost berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi
8	Aisha (2016)	Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi Setelah Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur	1. Bonus Plan dan Debt Covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 2. Political Cost berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi
9	Bara (2016)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi	1. Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. 2. Kompetensi dewan komisaris, Pertemuan komite audit, Kompetensi komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi.
10	Pambudi (2017)	Pengaruh Kepemilikan	1. Kepemilikan Manajerial

		Manajerial dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi	berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 2. Debt Covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi
11	Sulastiningsih dan Husna (2017)	Pengaruh Debt Covenant, Bonus Plan, Political Cost dan Risiko Litigasi Terhadap Penerapan Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur	1. Debt Covenant, Bonus Plan dan Political Cost tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi 2. Risiko Litigasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi
12	Andreas, <i>dkk</i> (2017)	Konservatisme Akuntansi di Indonesia	<i>Company Growth, Profitability</i> dan <i>IOS</i> berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7. Hipotesis Penelitian

2.7.1. Pengaruh *Bonus Plan* Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi

Pada *The Bonus Plan Hypothesis* dijelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini sehingga dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Hal ini dapat dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Vemilyarni (2014) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan laba perusahaan. Semakin rendah kepemilikan saham manajerial maka permintaan ditetapkannya konservatisme akuntansi akan semakin tinggi.

Penelitian yang mengungkapkan adanya pengaruh antara *Bonus Plan* yang diukur menggunakan proksi kepemilikan saham manajerial dilakukan oleh Iskandar (2016), penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wardhani (2008) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini disebabkan bahwa *bonus plan* yang diharapkan oleh manajer dinilai dari perolehan laba perusahaan apabila laba perusahaan tersebut menurun maka semakin kecil pula perolehan bonus yang diterima dari pemilik perusahaan. Oleh karena itu, manajer lebih cenderung menggunakan metode yang dapat menggeser laba masa depan menjadi laba masa kini, sehingga hal tersebut memicu adanya penerapan prinsip konservatisme yang diajukan oleh pemilik saham agar dapat menghindari adanya perilaku oportunistik manajer yang dapat merugikan para pemilik saham atau perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis penelitian :

H1 : *Bonus plan* berpengaruh terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi.

2.7.2 Pengaruh Political Cost Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi

Political Cost muncul akibat kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi rentan akan konflik yang muncul akibat pertentangan antara regulasi pemerintah dengan aksi yang dilakukan oleh perusahaan (Iskandar, 2016). *Political Cost* mengungkapkan bahwa perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Dikarenakan hal tersebut maka pihak perusahaan cenderung memilih menggunakan metode akuntansi yang dinilai konservatif yaitu yang mengakui laba dan pendapatan lebih lambat daripada beban dan hutang. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan laba agar terhindar dari biaya pajak yang tinggi.

Penelitian yang menerangkan adanya pengaruh antara political cost terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Vemilyarni (2014) yang mengukur *political cost* menggunakan proksi ukuran perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung menggunakan prinsip yang konservatif agar dapat mengurangi laba masa kini sehingga dapat mengurangi biaya politisi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis penelitian :

H2 : *Political Cost* berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2.7.3 Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi

Debt covenant memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegosiasi biaya kontrak hutang. Manajer juga tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang dilaporkan konservatif. Akan tetapi kreditor cenderung meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Fatmariansi, 2013). Semakin tinggi *debt covenant* perusahaan maka semakin dekat perusahaan pada batas yang dipersyaratkan dalam kontrak hutang. Semakin ketat batas yang dipersyaratkan dalam kontrak utang maka kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam kontrak utang, dalam situasi tersebut manajer yang memilih metode akuntansi yang lebih optimis akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar kontrak utangnya dan menghindari perusahaan dari biaya renegosiasi kontrak utang (Vemilyarni, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2017) yang mengukur *debt covenant* dengan menggunakan proksi rasio *leverage* menunjukkan hasil bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adhariani (2009). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar rasio *leverage* yang digunakan untuk mengukur *debt covenant*, semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang meningkatkan laba yang dilaporkan periode

sekarang atau laporan keuangan yang disajikan cenderung tidak konservatif (optimis). Oleh karenanya, pemilik perusahaan mengharuskan diterapkannya prinsip konservatisme akuntansi sehingga menghindari perbuatan manajemen yang dapat merugikan pihak kreditor. Dari penjelasan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis penelitian :

H3 : Debt Covenant berpengaruh terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi.

2.7.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi

Board of directors yang kuat akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. *Board of directors* didominasi oleh komisaris independen dimana komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham pengendali serta dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004). Di pihak lain, *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Yulistina, 2013).

Penelitian lain yang menerangkan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Wardani (2008) yang membuktikan bahwa *board of directors* yang kuat akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif dalam konservatisme yang diukur dengan ukuran nilai pasar. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian :

H4 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi.

2.7.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi

Brilianti (2013) mengatakan terdapat dua arah pandangan yang berbeda mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi. Pandangan yang pertama yaitu bahwa ukuran dewan komisaris yang besar kurang efektif daripada ukuran dewan yang kecil karena terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan kelompok dalam jumlah besar. Ahmed dan Deullman (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan (Brilianti 2013). Oleh sebab itu diperlukan ukuran dewan komisaris yang tepat untuk setiap perusahaan supaya proses monitoring dalam perusahaan lebih efektif.

Penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Yustina (2013) yang membuktikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris perusahaan maka semakin besar pula kekuatan dalam dewan komisaris dalam melakukan pengawasan sehingga penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula. Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian:

H5 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi.